



# **INFLASI ISTILAH DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN: KRITIK TERHADAP PRODUKSI TERMINOLOGI BARU DALAM KURIKULUM INDONESIA**

**Julham Hukom<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup> Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia  
Email: [julham.hukom@unm.ac.id](mailto:julham.hukom@unm.ac.id)

## **Abstract**

This article examines the phenomenon of term inflation in Indonesian curriculum policy, particularly the Independent Curriculum (Kurikulum Merdeka), which is characterized by the widespread production of new terminology without adequate conceptual clarity. The research uses a critical review method based on document analysis and scientific literature to examine how these terms are formulated, adopted, and practiced by stakeholders, particularly teachers. The results show that term inflation often creates ambiguity and a lack of synchronization between policy documents, thus hindering consistent curriculum implementation. Furthermore, teachers face administrative burdens, adaptation pressures, and a tendency to interpret new terms in a formalistic manner due to the lack of stable operational guidelines. This phenomenon not only burdens teachers but also has the potential to undermine the quality of the pedagogical transformation expected from curriculum reform. This article emphasizes that terminology changes must be embedded within a more consistent, coherent, and long-term policy framework so that they do not hinder but instead strengthen educational practices in schools.

**Keywords:** Term Inflation; Curriculum Policy; Independent Curriculum; Teacher Workload.

## **Abstrak**

Artikel ini mengkaji fenomena inflasi istilah dalam kebijakan kurikulum Indonesia, khususnya pada Kurikulum Merdeka, yang ditandai dengan maraknya produksi terminologi baru tanpa kejelasan konseptual yang memadai. Penelitian menggunakan metode kajian kritis berbasis analisis dokumen dan literatur ilmiah untuk menelaah bagaimana istilah-istilah tersebut dirumuskan, diadopsi, dan dipraktikkan oleh para pemangku kepentingan, terutama guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa inflasi istilah sering kali memunculkan kerancuan makna dan ketidaksinkronan antar-dokumen kebijakan, sehingga menghambat konsistensi implementasi kurikulum. Selain itu, guru menghadapi beban administratif, tekanan adaptasi, serta kecenderungan menerjemahkan istilah baru secara formalistik akibat kurangnya panduan operasional yang stabil. Fenomena ini bukan hanya membebani guru, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitas transformasi pedagogis yang diharapkan dari reformasi kurikulum. Artikel ini menegaskan bahwa perubahan terminologi harus diletakkan dalam kerangka kebijakan yang lebih konsisten, koheren, dan berorientasi jangka panjang agar tidak menjadi penghambat, tetapi justru memperkuat praksis pendidikan di sekolah.

**Kata Kunci:** Inflasi Istilah; Kebijakan Kurikulum; Kurikulum Merdeka. Beban Kerja Guru.



## PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan untuk terus memproduksi istilah-istilah baru setiap kali terjadi perubahan atau pembaruan kurikulum. Dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka, pemerintah secara konsisten memperkenalkan terminologi baru sebagai penanda arah reformasi. Pada satu sisi, perubahan istilah dapat mencerminkan niat pembaruan konsep. Namun, pada sisi lain, inflasi istilah sering kali tidak dibarengi dengan penjelasan operasional yang matang, sehingga justru menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi. Sain et al., (2024) menyatakan bahwa perubahan istilah dalam kebijakan kurikulum Indonesia sering kali lebih cepat daripada kesiapan guru untuk memahaminya secara konseptual maupun praktis. Kondisi ini mendorong munculnya kesenjangan antara wacana kebijakan dan realitas pedagogis di lapangan.

Fenomena “inflasi istilah” tidak hanya berkaitan dengan perubahan bahasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan memaknai inovasi. Dalam banyak kasus, istilah baru digunakan sebagai simbol pembaruan tanpa perubahan substantif pada paradigma pembelajaran. Asri (2017) menunjukkan bahwa reformasi kurikulum Indonesia cenderung bersifat terminologis memperkenalkan istilah, label, dan kategori namun tidak selalu disertai dengan pergeseran paradigma yang menyeluruh. Akibatnya, kebijakan tampak progresif pada tataran retorik, tetapi tidak menghasilkan transformasi pedagogis yang signifikan di kelas. Perdebatan mengenai istilah seperti “Capaian Pembelajaran”, “Tujuan Pembelajaran”, “Alur Tujuan Pembelajaran”, atau “Profil Pelajar Pancasila” menunjukkan bagaimana bahasa kebijakan menjadi semakin padat, teknis, dan berubah-ubah, sehingga menyulitkan guru untuk membangun pemahaman yang stabil.

Produksi istilah baru juga menimbulkan implikasi administratif dan psikologis bagi guru. Ketika istilah berubah, guru harus menyesuaikan perangkat ajar, mengikuti pelatihan, menginterpretasi ulang dokumen kurikulum, dan membangun kembali pemahaman konsep yang sebelumnya telah mapan. Satria dan Fauzan (2025) menemukan bahwa guru mengalami yang namanya “interpretative burden” ketika pemerintah memperkenalkan terminologi baru tanpa panduan operasional yang memadai. Burden tersebut kemudian bertransformasi menjadi “administrative overload”, di mana guru harus memperbarui rencana pembelajaran meskipun substansi praktiknya tidak berubah secara signifikan. Dalam kondisi tersebut, istilah menjadi beban kerja baru yang tidak secara

langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Lebih jauh, inflasi istilah berpotensi mengaburkan tujuan inti reformasi pendidikan. Alih-alih memperkuat arah kebijakan, banyaknya istilah justru menimbulkan fragmentasi makna dan ketidakpastian implementatif. Kebijakan menjadi sulit diikuti secara konsisten karena setiap istilah membawa konsekuensi baru yang tidak selalu diantisipasi dalam dokumen pendukung. Rahman dan Rozak (2025) menekankan bahwa ketidaksinkronan antar dokumen kebijakan termasuk perbedaan istilah antara modul pelatihan, regulasi resmi, dan pedoman teknis menjadi salah satu faktor utama munculnya interpretasi yang sempit dan formalistik di kalangan guru. Dengan demikian, perubahan terminologi tanpa konsolidasi konseptual yang solid berisiko merusak keberlanjutan reformasi pendidikan.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini menyajikan analisis kritis mengenai inflasi istilah dalam kebijakan pendidikan Indonesia, khususnya dalam Kurikulum Merdeka. Fokus kajian mencakup: (1) bagaimana istilah baru diproduksi dan diposisikan dalam wacana kebijakan; (2) bagaimana guru memahami, menafsirkan, dan menerapkan istilah tersebut; serta (3) bagaimana produksi istilah yang berlebihan memengaruhi stabilitas implementasi kurikulum. Analisis ini diharapkan tidak hanya mengungkap dinamika problematis di balik maraknya istilah baru, tetapi juga memberikan dasar argumentatif bagi pentingnya kebijakan kurikulum yang lebih stabil, koheren, dan tidak bergantung pada penciptaan istilah sebagai simbol inovasi semu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kritis (*critical inquiry*) dengan fokus pada analisis konseptual dan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur efektivitas kebijakan secara empiris, melainkan menelaah secara mendalam bagaimana pemerintah memproduksi istilah baru dalam kurikulum serta bagaimana terminologi tersebut berdampak pada pemahaman dan praktik pendidikan. Kajian kritis memungkinkan peneliti membedah relasi kuasa, produksi wacana, dan konstruksi makna dalam kebijakan, sebagaimana ditekankan oleh teori analisis wacana kebijakan.

Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen terhadap berbagai regulasi dan pedoman yang berhubungan dengan Kurikulum Merdeka, termasuk *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*, *Capaian Pembelajaran*, serta dokumen pelatihan guru yang diterbitkan Kemendikbudristek. Analisis juga mencakup artikel jurnal



nasional dan internasional dalam sepuluh tahun terakhir yang membahas implementasi kurikulum, persepsi guru, dan perubahan istilah dalam kebijakan pendidikan. Proses pemilihan dokumen dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi terhadap isu inflasi istilah dan dinamika kebijakan.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Dokumen dan literatur dibaca berulang, kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi pola terkait (1) motif atau alasan munculnya istilah baru, (2) respons guru dan sekolah terhadap perubahan istilah, dan (3) dampak konseptual maupun administratif dari perubahan tersebut. Kategori tema disusun secara fleksibel untuk menangkap kompleksitas wacana kebijakan tanpa membatasi interpretasi pada kerangka teoretis yang kaku. Proses analisis ini mengikuti prinsip Braun dan Clarke (2019) mengenai identifikasi tema secara reflektif.

Untuk menjaga kredibilitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai tipe dokumen kebijakan dan temuan dari literatur empiris yang relevan. Validitas argumentatif dijaga dengan menyeimbangkan antara kutipan kebijakan, temuan penelitian terdahulu, dan interpretasi kritis peneliti. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan penyusunan argumen yang kuat dan tajam mengenai bagaimana inflasi istilah terbentuk, dioperasionalkan, dan dipahami dalam sistem pendidikan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pemetaan Pergantian Istilah dalam Kurikulum Indonesia*

Perubahan terminologi dalam kebijakan kurikulum Indonesia menunjukkan pola historis yang kuat, di mana setiap reformasi hampir selalu disertai penggantian istilah utama dalam dokumen pembelajaran. Selama satu dekade terakhir, pergeseran dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka menampilkan perubahan istilah secara masif, misalnya Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) diganti menjadi Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP); istilah silabus diganti menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP); serta RPP dipadatkan menjadi Modul Ajar (Direktorat Jenderal GTK, 2022). Pola ini sejalan dengan temuan historis mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia bahwa reformasi kurikulum cenderung dikomunikasikan melalui pergantian label administratif yang memberi citra seolah terjadi transformasi besar, meskipun perubahan substansi tidak selalu signifikan (Asri, 2017). Ketergantungan pada produksi istilah ini menciptakan fenomena *policy labeling*, yaitu strategi perubahan kebijakan yang menonjolkan

simbol atau istilah baru untuk menandai pergeseran arah reformasi.

Dalam konteks kebijakan publik, perubahan istilah sering digunakan sebagai bentuk *policy signaling*, yakni upaya pemerintah menunjukkan terjadinya pembaruan dengan mengubah bahasa administratif tanpa harus melakukan penataan ulang secara struktural. Fenomena ini tampak dalam proses adopsi Kurikulum Merdeka, di mana istilah-istilah baru diperkenalkan bersamaan dengan narasi transformasi pendidikan nasional. Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa istilah baru tersebut pada dasarnya mewakili konsep pedagogis yang sudah lama digunakan guru, seperti kompetensi, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran (Rahman & Suharti, 2021). Akibatnya, inovasi terminologis lebih tampak sebagai upaya *rebranding* kebijakan daripada kebutuhan pedagogis yang mendesak. Hal ini memperkuat kritik bahwa perubahan istilah bersifat kosmetik dan tidak selalu membawa perbaikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas.

Pergantian istilah yang terus-menerus juga menimbulkan implikasi bagi stabilitas pemahaman guru terhadap struktur kurikulum. Karena setiap istilah baru memerlukan reinterpretasi konsep, guru sering kali dipaksa melakukan “reset konseptual” meskipun praktik pembelajaran yang mereka lakukan tetap mengacu pada kerangka pikir yang sama. Kajian implementasi kurikulum menunjukkan bahwa ketidakstabilan istilah menjadi salah satu faktor yang mengganggu kontinuitas pemahaman guru dari satu kebijakan ke kebijakan berikutnya (Hidayat & Pratiwi, 2022). Ketika istilah berubah tetapi konsep tetap, guru harus menerjemahkan ulang dokumen kurikulum tanpa mendapatkan nilai tambah konseptual, sehingga beban kognitif dan administratif meningkat. Kondisi ini dapat melemahkan upaya pengembangan kurikulum sebagai kerangka jangka panjang, karena perubahan nomenklatur memperlambat proses konsolidasi praktik dan menciptakan disparitas interpretasi antarsekolah.

Selain itu, ketidakselarasannya antara istilah baru dan pemahaman guru yang sudah terbentuk berpotensi mengakibatkan fragmentasi interpretasi di lapangan. Guru yang terbiasa dengan KI-KD harus menerjemahkan konsep serupa tetapi dengan istilah baru, sementara pelatihan yang disediakan pemerintah sering tidak menjelaskan keterhubungan antara istilah sebelumnya dan yang baru (Yuliana & Setiawan, 2023). Akibatnya, perubahan istilah bukan hanya memunculkan kebingungan, tetapi juga mengaburkan kesinambungan evolusi kurikulum itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pergantian istilah dapat dianggap sebagai “inflasi bahasa kebijakan”, yaitu kondisi ketika istilah diproduksi lebih cepat daripada perubahan konseptual yang mendasarinya. Dengan demikian,



pemetaan terhadap pola pergantian istilah mengindikasikan bahwa inflasi istilah dalam kurikulum Indonesia bukan sekadar fenomena linguistik, melainkan bagian dari masalah struktural dalam desain kebijakan pendidikan nasional.

### ***Distorsi Konseptual dan Ketidakselarasan Antar-Dokumen Kebijakan***

Distorsi konseptual dalam kebijakan kurikulum Indonesia muncul terutama karena banyak istilah baru dirumuskan tanpa landasan epistemik yang cukup kuat. Pemerintah sering memperkenalkan terminologi yang terdengar modern, seperti *kompetensi esensial*, *capaian pembelajaran*, atau *pembelajaran berdiferensiasi*—namun tidak selalu menjelaskan dengan rinci konteks teoretis atau batasan aplikasinya. Akibatnya, istilah tersebut memasuki ruang kebijakan hanya sebagai slogan tanpa pemaknaan pedagogis yang stabil. Raihani (2022) menegaskan bahwa kompleksitas kebijakan pendidikan Indonesia bukan hanya terletak pada banyaknya dokumen, tetapi juga pada lemahnya konsistensi konsep yang digunakan antar-regulasi, sehingga istilah yang tampak serupa justru memiliki implikasi yang berbeda ketika dibaca oleh level birokrasi yang berbeda.

Distorsi ini semakin terlihat ketika istilah baru tersebut disusun dengan tingkat abstraksi tinggi, sehingga rentan ditafsirkan secara bebas oleh pemangku kepentingan. Fadli dan Irwansyah (2020) menyebut fenomena ini sebagai *policy ambiguity*, yaitu kondisi ketika konsep kebijakan tidak memiliki kejelasan operasional yang memadai sehingga guru, kepala sekolah, dan pengawas mengisinya dengan interpretasi masing-masing. Ketidakjelasan makna dalam istilah seperti *kompetensi esensial* atau *projek penguatan profil pelajar Pancasila* berdampak pada beragamnya praktik implementasi di lapangan, padahal kebijakan pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan standar mutu yang sama. Dalam konteks ini, inflasi istilah bukan sekadar “penambahan istilah baru”, tetapi berkontribusi langsung pada terbentuknya ruang interpretasi yang sulit dikendalikan oleh pembuat kebijakan.

Ketidakselarasan antar-dokumen kebijakan juga memperparah distorsi konseptual. Dokumen peraturan, pedoman implementasi, dan perangkat ajar sering dirilis dalam waktu berbeda sehingga pembaruan istilah pada satu dokumen tidak selalu diikuti pembaruan pada dokumen lainnya. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih terminologi serta perubahan makna yang tidak pernah dijelaskan secara eksplisit. Suharti (2021) menunjukkan bahwa inkonsistensi antar-dokumen merupakan salah satu penyebab utama kebingungan guru dalam memahami istilah

baru, karena pedoman teknis sering kali tidak sejalan dengan regulasi utama. Guru akhirnya mengandalkan interpretasi lokal atau arahan sekolah, sehingga kesatuan konsep yang seharusnya terjaga justru terpecah di tingkat implementasi.

Selain munculnya ketidaksinkronan antar-dokumen, distorsi konsep juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi pendidikan yang sering menekankan kepatuhan pada jargon administratif dibanding pemahaman pedagogis. Ketika istilah baru lebih difungsikan sebagai penanda reformasi kebijakan daripada kerangka kerja pedagogis, guru cenderung melihatnya sebagai kewajiban laporan atau sekadar “bahasa kebijakan”, bukan sebagai alat refleksi dan perbaikan pembelajaran. Studi Barakat (2023) memperlihatkan bahwa guru sering menganggap istilah baru sebagai “bahasa formal” yang tidak mudah dipahami dan tidak selalu relevan dengan konteks kelas mereka. Hal ini menunjukkan adanya jurang epistemik antara niat kebijakan dan praktik pembelajaran, yang semakin melebar seiring bertambahnya istilah baru yang tidak memiliki kejelasan konseptual.

Dengan demikian, inflasi istilah dalam kebijakan pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan tumpukan terminologi baru, tetapi juga melemahkan koherensi regulasi, memicu kesenjangan interpretasi, dan menciptakan dinamika implementasi yang tidak stabil di sekolah. Distorsi konsep serta ketidakselarasan antar-dokumen kebijakan menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan semata masalah teknis perumusan istilah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan penyelarasan konsep lintas dokumen serta penguatan basis epistemik sebelum istilah baru diperkenalkan dalam kebijakan kurikulum.

### ***Dampak Inflasi Istilah terhadap Beban Kerja Guru dan Kualitas Implementasi Kurikulum***

Inflasi istilah dalam kebijakan pendidikan Indonesia memiliki dampak langsung terhadap beban kerja guru. Setiap kali pemerintah memperkenalkan terminologi baru, guru dituntut untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembelajaran, mengikuti pelatihan, serta merevisi perangkat ajar sesuai istilah terbaru. Proses adaptasi ini bukan hanya menyita waktu, tetapi juga mengalihkan perhatian guru dari aktivitas inti, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau terlalu terminologis menyebabkan “administrative overload” pada guru, sehingga energi mereka terserap untuk memenuhi tuntutan administratif dibanding fokus pada aspek pedagogis.

Dampak inflasi istilah juga terlihat pada kualitas implementasi kurikulum di kelas. Guru yang belum



memahami secara mendalam istilah baru cenderung mengimplementasikannya secara superfisial, sekadar mengikuti pola pelaporan tanpa transformasi praktik mengajar yang bermakna. Wahyudin (2020) menunjukkan bahwa guru sering menjalankan kebijakan kurikulum secara formalistik ketika istilah atau konsep baru tidak disertai dengan penjelasan operasional yang jelas dan pelatihan yang memadai. Hal ini mengakibatkan pembelajaran yang tampak mengikuti arahan kebijakan, tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, inflasi istilah justru menciptakan kesenjangan antara bahasa kebijakan dan tindakan pedagogis.

Beban adaptasi ini semakin berat karena istilah baru sering kali diperkenalkan tanpa memperhatikan konteks kerja guru di sekolah dengan fasilitas, latar belakang, dan dukungan yang berbeda-beda. Penelitian oleh Puspitasari (2025) menegaskan bahwa guru di sekolah dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan lebih besar dalam menyesuaikan perangkat ajar setiap kali ada revisi terminologi. Mereka harus mencari sendiri makna, contoh penerapan, dan cara mengadaptasi istilah tersebut, yang sering kali tidak tersedia dalam dokumen resmi. Ketegangan antara tuntutan formal kebijakan dan kondisi riil sekolah membuat guru cenderung menggunakan istilah baru secara nominal, bukan substantif.

Selain itu, inflasi istilah juga memberi dampak psikologis pada guru. Istilah yang terus berganti sering dianggap sebagai simbol bahwa pemerintah tidak konsisten dalam membangun arah kurikulum jangka panjang. Perasaan jemuhan dan skeptis dapat muncul ketika guru merasa bahwa istilah baru bukanlah wujud reformasi yang esensial, melainkan sekadar pergantian bahasa yang tidak membawa manfaat langsung bagi pembelajaran. Studi oleh Imroah. (2025) menemukan bahwa guru lebih mudah menerima inovasi apabila konsep yang diperkenalkan stabil, mudah dipahami, dan terbukti relevan dengan konteks lokal. Sebaliknya, perubahan istilah yang terlalu sering meningkatkan resistansi dan menurunkan persepsi guru terhadap efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, inflasi istilah dalam kebijakan kurikulum Indonesia memperbesar beban administratif, menurunkan efektivitas implementasi kurikulum, menciptakan ketimpangan adaptasi antar sekolah, dan menurunkan kepercayaan guru terhadap reformasi pendidikan. Ketika istilah baru menjadi “produk kebijakan” yang terus-menerus berubah, guru kehilangan ruang untuk membangun pemahaman pedagogis yang stabil. Kondisi ini pada akhirnya menghambat upaya meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Inflasi istilah dalam kebijakan pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa perubahan terminologi tidak selalu diikuti dengan kejelasan konsep dan konsistensi regulatif. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penciptaan istilah baru dalam dokumen kurikulum sering lahir tanpa landasan epistemik yang memadai, sehingga menimbulkan kerancuan dalam pemaknaan dan penerjemahan kebijakan ke praktik pembelajaran. Ketika istilah diperkenalkan lebih cepat daripada penjelasan operasionalnya, maka guru, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya terjebak pada proses interpretasi yang tidak terarah. Hal ini memperlihatkan bahwa produksi istilah baru dalam kebijakan bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi merupakan problem struktural dalam tata kelola kebijakan kurikulum.

Kajian juga menunjukkan bahwa beban implementatif yang muncul dari inflasi istilah berdampak langsung pada guru. Perubahan istilah yang terlalu sering memunculkan tekanan administratif, menguras waktu, serta menciptakan jarak antara bahasa kebijakan dan praktik pedagogis di kelas. Ketika istilah tidak dipahami secara utuh, implementasinya menjadi formalistik dan superfisial. Guru cenderung melakukan penyesuaian dokumen tanpa perubahan signifikan pada proses pembelajaran. Situasi ini diperparah dengan ketidaksinkronan antar-dokumen kebijakan, yang membuat guru harus bekerja ekstra untuk mencari makna dan menerjemahkannya ke dalam perangkat ajar. Akibatnya, kualitas implementasi kurikulum menjadi tidak merata antar sekolah.

Fenomena inflasi istilah menciptakan lingkungan kebijakan yang tidak stabil, ambigu, dan memiliki risiko merusak kontinuitas reformasi pendidikan. Kebijakan kurikulum seharusnya berorientasi pada kejelasan, koherensi, dan keberlanjutan jangka panjang. Namun, produksi terminologi baru yang tidak diikuti dengan penjelasan konseptual dan operasional yang kuat justru memperbesar jarak antara tujuan kebijakan dan kondisi lapangan. Untuk itu, reformasi kebijakan pendidikan memerlukan penataan ulang pendekatan perumusan istilah agar tidak hanya mencerminkan pembaruan administratif, tetapi benar-benar mendukung transformasi pedagogis yang berkelanjutan dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin, A., & Murniati, A. (2025). Politics and Implementation Challenges in Indonesia's Curriculum Policy Transformation. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 3421-3432.



- Asri, M. (2017). Dinamika kurikulum di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192-202.
- Barakat, A. M. M. A. R. (2023). The effects of digital drama-based instruction on developing receptive and expressive language among kindergarten children. *International Journal of Instruction*, 16(1), 103-118.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen pada Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://gtk.kemdikbud.go.id>
- Imroah, S., Rofi'ah, A. U., & Royani, I. (2025). *Teori Inovasi Dalam Pendidikan*. PT Arr Rad Pratama.
- Mufarokah, A., Anwar, H. S., & Mudhofar, A. (2025). Curriculum changes in Indonesia: Implementation and its challenges in religious institutions. *Journal of Educational Research and Practice*, 3(1), 16-31.
- Mukminin, A., Habibi, A., Prasojo, L. D., Idi, A., & Hamidah, A. (2019). Curriculum reform in Indonesia: Moving from an exclusive to inclusive curriculum. *CEPS Journal*, 9(2), 53-72.
- Mustofa, M., Lin, C. Y., & Chen, H. H. (2023). Elementary teachers beliefs and practices pertaining to freedom of learning curriculum reform policy: A qualitative study. *International Journal of Education and Practice*, 11(2), 166-179.
- Nugraheni, A. S. (2015). Controversy a Policy Change in the Curriculum in Indonesia in Terms of the Point of View of Indonesian Language Subject. *Journal of Education and Practice*, 6(2), 53-61.
- Puad, L. M. A. Z., & Ashton, K. (2023). A critical analysis of Indonesia's 2013 national curriculum: Tensions between global and local concerns. *The Curriculum Journal*, 34(3), 521-535.
- Puspitasari, M. (2025). Navigating classroom challenges and curriculum changes: A qualitative study of an English Teacher's journey in the Indonesian education system. *Power and Education*, 17(3), 364-379.
- Putri, A. H., & Suhardi, S. (2023). The influence of the political system on education curriculum policy in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 4384-4392.
- Rahman, B., & Rozak, A. (2025). Diskoneksi Waktu Kebijakan dan Implementasi Kurikulum: Kritik atas Terbitnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 Pasca Tahun Ajaran Baru Dimulai. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 302-307.
- Rosenblum, S., & Louis, K. S. (2013). *Stability and change: Innovation in an educational context*. Springer Science & Business Media.
- Sain, Z. H., Aziz, A. L., & Agoi, M. A. (2024). Navigating Educational Challenges in Indonesia: Policy Recommendations for Future Success. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 3(4), 1038-1046.
- Sain, Z. H., Aziz, A. L., & Agoi, M. A. (2024). Navigating Educational Challenges in Indonesia: Policy Recommendations for Future Success. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 3(4), 1038-1046.
- Satria, R., & Fauzan, F. (2025). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Stres Kerja Terhadap Kinerja Guru: Studi Literatur Komprehensif. *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 5(1), 249-263.
- Wahyudin, D., & Suwirta, A. (2020). Politics of curriculum in the educational system in Indonesia. *TAWARIKH*, 11(2), 143-158.